

SKRIPSI

EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN

SENGKETA SAKO DAN PUSAKO DI KECAMATAN

KURANJI KOTA PADANG

(Diajukan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum)

DISUSUN OLEH:

SOLIHANDRACEM
1510111153

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM (PK III)



Pembimbing :

Hj. Zahara, SH., M.H

Dr. Yasniwati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SAKO DAN PUSAKO DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

**(Solihandracem, 1510111153, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK III
Perdata Adat dan Islam, 64 Halaman, 2019)**

ABSTRAK

Peradilan adat merupakan sebuah lembaga adat yang memiliki fungsi untuk penyelesaian sengketa *sako* dan *pusako*. Setiap permasalahan adat diselesaikan secara adat terkhususnya di Kecamatan Kuranji . Peradilan adat diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat no 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Untuk melihat eksistensi peradilan adat di Kuranji maka perlu dilihat keberadaan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa *sako* dan *pusako* di Kuranji. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu Bagaimana ruang lingkup sengketa *sako* dan *pusako* di Kuranji, Bagaimana proses penyelesaian sengketa *sako* dan *pusako* di Kuranji dan bagaimana eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa *sako* dan *pusako* di Kuranji. Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris, penelitian bersifat deskriptif data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwasanya ruang lingkup sengketa *sako* dan *pusako* di Kuranji didominasi secara mutlak oleh sengketa *pusako*. Proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Kuranji dimulai dengan memasukan permohonan, tiga kali persidangan untuk pemohon, tiga kali persidangan untuk termohon, pemeriksaan alat bukti, jika diperlukan perangkat Kerapatan Adat Nagari yang didalamnya ada majelis peradilan adat memantau lokasi sengketa, dan terakhir putusan dikeluarkan oleh peradilan adat. Eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa *pusako* sebagai peradilan pendahuluan, sebelum perkara tersebut masuk ke pengadilan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran agar mesosialisasikan kepada masyarakat, sehingga penyelesaian sengketa melalui peradilan menjadi lebih baik. Dan untuk pemerintah semoga membuat aturan lebih terperinci sehingga adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa adat.

Kata Kunci : Peradilan Adat, *Sako* dan *Pusako*